

BAB V

PENUTUP

Bab V disajikan penutup dari penelitian Respon Pemerintah Desa dalam Menghadapi Fenomena Pernikahan Dini di Desa Jurangjero Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora. Penulis akan memberikan kesimpulan dari penelitian lapangan serta memberi beberapa saran kepada pihak yang berkaitan dengan permasalahan pernikahan dini

5.1. Kesimpulan

Pernikahan dini di Desa Jurangjero sudah ada sejak jaman dulu yang terbawa hingga sekarang dan hingga saat ini belum ada kesadaran masyarakat untuk menghindarinya. Selain kesadaran yang belum ada dari masyarakat ketidakpahaman akan bahaya pernikahan dini dan resiko kesehatan pun belum tertanam dalam benak masyarakat sehingga menyebabkan kasus pernikahan dini di Desa Jurangjero merupakan kasus tertinggi di tingkat Kecamatan. Dalam upaya mengatasinya belum ada upaya yang signifikan baik dari pemerintah Desa, Kecamatan maupun Kabupaten. Di sisi lain pemerintah desa merasa kewalahan dalam mengatasi kasus ini karena rasa pakewuh yang ada dalam aparat juga kesadaran dari masyarakat yang kurang dan fasilitator atau mentor dari Pemkab pun belum ada dalam mengedukasi bahaya pernikahan dini guna menambah pengetahuan tentang bahaya pernikahan dini.

Kelompok remaja maupun organisasi perempuan di Desa ini sudah dibentuk namun belum juga memberi pengaruh yang signifikan terhadap kasus pernikahan dini, baik dari kelompok remaja maupun organisasi perempuan tidak enggan untuk mengingatkan untuk tidak melakukan pernikahan dini akan tetapi masyarakat tetap teguh dengan pendiriannya untuk tetap menikahkan anaknya karena merasa dengan menikahkan anaknya kehidupan mereka akan lebih baik dan beban mereka berkurang dan segala cara akan dilakukan demi bisa mendapatkan dispensi untuk anaknya dapat melangsungkan pernikahan di usia yang belum cukup dalam batas

minimal usia pernikahan. Namun pada kenyataannya harapan mereka di awal tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Pasca menikah anak tetap menjadi tanggungjawab orang tua karena mereka belum siap mencari kehidupan sendiri yang diakibatkan belum cukupnya usia mereka maupun kekuatan mental dalam menghadapi kehidupan berumah tangga.

Sejauh ini pemerintah desa memiliki peran yang dominan dalam pernikahan dini yang mana pemerintah desa selalu membantu proses demi proses karena merasa setiap warganya berhak mendapatkan pelayanan demi menjaga konstituen baik pelayanan pernikahan dini maupun yang lainnya. Bahkan tidak sedikit pula warga yang menyerahkan segala keperluan dalam melangsungkan pernikahan atau dalam kata lain pasrah segala proses kepada pihak desa dan pihak desa enggan untuk menolak karena aparat yang ada dalam kantor desa tidak lain merupakan warga desa Jurangjero itu sendiri yang merasa jika tidak dibantu akan merasa pakewuh dengan tetangganya yang di sisi lain sudah mempersiapkan segala keperluan untuk acara pernikahan anaknya.

Dengan demikian pernikahan dini di Desa Jurangjero merupakan sebuah permasalahan yang sampai saat ini belum dapat diatasi pemerintah karena pernikahan dini merupakan permasalahan yang kompleks sehingga cara mengatasinya tidak bisa semata-mata menggunakan kebijakan maupun tindakan dari pemerintah tetapi perlu adanya kesadaran dari lingkungan masyarakat. Pemerintah desa pun kesulitan dalam mengatasinya di sisi para aparat merasa pakewuh dengan tetangganya sendiri dan pengetahuan bahaya pernikahan dini yang minim kesadaran dari masyarakat juga belum ada untuk mengatasi ini serta ketidakjujuran masyarakat dalam melakukan dispensasi pernikahan di pengadilan agama mengakibatkan pernikahan dini di Desa Jurangjero masih terjadi hingga sekarang.

5.2. Saran

1. Saran dari penulis untuk pemerintah Desa Jurangjero kedepannya harus lebih tegas dalam menghadapi pernikahan dini yang mana jika aparat desa merasa pakewuh saat ada pengajuan pernikahan di bawah umur pemerintah desa harus mampu mengedukasi warganya untuk sadar akan bahaya pernikahan dini. Dalam hal ini peran kelompok remaja harus dimanfaatkan dan ditingkatkan lagi karena mereka merupakan akar dari permasalahan ini dan juga mereka pula yang paham akan masalah-masalah yang biasa dihadapi teman sebayanya tidak sampai di situ pemerintah desa juga harus memberi anggaran khusus untuk kelompok remaja agar kelompok remaja dapat melakukan kegiatan-kegiatan dan memiliki wadah dalam berdiskusi. Tidak hanya kelompok remaja, organisasi perempuan di sini juga diperlukan untuk membina kelompok remaja yang mana Desa Jurangjero harus memiliki salah satu dari kader PKK yang dianggap kompeten untuk membina kelompok remaja dan mengedukasi remaja tentang pentingnya pendidikan dan karir pasca sekolah. Dengan begitu remaja memiliki wadah untuk berekspresi dan pernikahan dini bisa dihindari karena mereka mengerti bahaya pernikahan dini dan pentingnya pendidikan dan karir.
2. Saran untuk pemerintah Kabupaten Blora kedepannya harus tegas dalam hal dispensasi pernikahan yang mana dalam penelitian ini telah ditemukan fakta atas kebohongan alasan pengajuan pernikahan yang kemudian membuat seseorang lolos untuk melangsungkan pernikahan dini. Pemerintah harus mampu memilah dan lebih teliti serta menerapkan peraturan baru yang mana pada saat melakukan dispensasi di Pengadilan Agama harus membawa bukti yang kuat dan alasan yang kuat sehingga tidak semua yang melakukan dispensasi diterima. Selain itu pemerintah Kabupaten harus memberi fasilitator atau mentor yang kompeten di setiap desa untuk mengedukasi remaja maupun orang tua tentang bahayanya pernikahan dini, ini bisa diambil dari organisasi desa atau kader PKK yang dianggap kompeten dan berpendidikan yang mampu menyampaikan informasi

dengan baik dan tidak lupa memberi anggaran untuk mentor ini agar mentor mampu bekerja dengan maksimal dan memberi *output* sesuai harapan.

